



***Disfunctions of Bureaucracy dan Mal-Administrasi
Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten
Sinjai***

***Dysfunctions of Bureaucracy and Government
Maladministration in Waste Management in Sinjai District***

Syahril*, Rasyid Thaha & A.M. Rusli*****

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Sekolah Pascasarjana,
Universitas Hasanuddin, Indonesia

Diterima: 06 Januari 2021; Direview: 06 Januari 2021; Disetujui: 10 Mei 2021

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang patologi birokrasi pengelolaan sampah di Kabupaten Sinjai serta upaya pemerintah dalam menangani patologi yang terjadi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang akan memberikan gambaran faktual mengenai tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan: bentuk patologi yang ditemukan yaitu Disfunctions of bureaucracy dan Mal-Administrasi pemerintah secara struktur harus melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yaitu sarana dan prasarana mesti sesuai regulasi dan kinerja petugas yang seharusnya berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Upaya yang harus dilakukan pemerintah yaitu pembinaan dan pengawasan tentang regulasi yang telah ditetapkan dan tertuang dalam peraturan daerah kabupaten sinjai nomor 10 Tahun 2017 yang harus dimaksimalkan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengatasi bentuk patologi birokrasi yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kebersihan yaitu tidak maksimalnya pembinaan seperti misalnya edukasi kesadaran kebersihan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat yang dilakukan disetiap level pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai pada tingkat kelurahan.

Kata Kunci: Bureaucratic Pathology; Disfunctions of Bureaucracy; Mal-Administrasi Pemerintah; Pengelolaan Sampah; Sinjai

Abstract

This paper aims to examine the bureaucratic pathology of waste management in Sinjai Regency as well as the government's efforts to deal with the pathology that occurs. The type of research used in this research is qualitative which will provide a factual picture of the research objectives. The results showed: the form of pathology found, namely Disfunctions of bureaucracy and Mal-Administration of the government structurally must implement waste management policies, namely the facilities and infrastructure must comply with regulations and the performance of officers who should run according to their duties and functions Efforts that must be made by the government, namely guidance and supervision of the regulations that have been set and contained in the regional regulations of Sinjai Regency number 10 of 2017 must be maximized. The efforts made by the Sinjai Regency government in overcoming the form of bureaucratic pathology faced in the implementation of hygiene policies, namely the lack of guidance, such as education on awareness of cleanliness to the public and supervision of people who are still littering in any place carried out at every level of government starting from the Regency level, the District level to the village level.

Keywords: Bureaucratic Pathology; Dysfunctions of bureaucracy; Government maladministration; Waste management; Sinjai

How to cite: Syahril, Rasyid, T., A.M. Rusli. (2021). *Disfunctions of Bureaucracy dan Mal-Administrasi Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Sinjai*. PERSPEKTIF, 10 (2): 498-504.

*Corresponding author:

*E-mail: immawansvahril@gmail.com

**Email: andirusli2707@gmail.com

***Email: rasvid.thaha@yahoo.com

PENDAHULUAN

Birokrasi daerah dibentuk untuk menjalankan tata pemerintahan yang baik. Dalam mewujudkan fungsinya, birokrasi dipengaruhi oleh fenomena sosial dari internal maupun eksternal organisasi (Yunas, 2016). Untuk proses itulah, birokrasi acapkali mengalami hambatan yang berpotensi buruknya kinerja yang disebut dengan penyakit birokrasi. Penyakit yang dimaksud adalah fenomena sosial pegawai daerah yang perilakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma, moralitas, dan rasionalitas yang dipersyaratkan oleh pimpinan. Fenomena yang menghiastansi pemerintahan daerah ini seakan tidak berujung, karena sudah banyak cara yang dilakukan untuk mengatasi perilaku menyimpang tetapi sampai saat ini masih tetap saja ada pegawai yang nakal. Kenakalan pegawai tersebut dimulai dari hal yang kecil seperti datang terlambat, pulang lebih cepat, bolos kerja, bermain game atau *social network*, dan yang paling menggurita saat ini ditubuh birokrasi adalah melakukan korupsi.

Ruang lingkup patologi birokrasi menurut Smith (1988) dalam (Ma'ruf, 2010) dapat dipetakan dalam dua konsep besar, yaitu: 1) *Disfunctions of bureaucracy*, yakni berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi; 2) *Mal-administration*, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi: perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada di dalam birokrasi.

Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah ditindaklanjuti dengan PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan permendagri Nomor 33 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan sampah sebagai tindak lanjut dari ketiga peraturan perundangan ini, setiap daerah diwajibkan menyusun kebijakan tentang pengelolaan sampah yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu kabupaten yang tidak luput dari permasalahan lingkungan khususnya tentang kebersihan. Dari waktu ke waktu pemerintahan kabupaten sinjai masih kesulitan dalam menangani permasalahan kebersihan terkhusus yang ada di wilayah perkotaan yang berasal dari aktivitas kehidupan masyarakat.

Salah satu jalan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani hal tersebut maka Pada tahun 2017 di Kabupaten Sinjai telah dibentuk sebuah regulasi terkait dengan penanganan sampah yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 10 Tahun 2017 tentang pengolahan sampah. Pada pasal 4 Peraturan daerah kabupaten Sinjai No 10 tahun 2017. Dijelaskan tujuan diselenggarakan pengelolaan sampah yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pada kenyataannya regulasi belum berjalan sesuai dengan standar yang telah ditentukan yaitu dalam penanganan sampah mesti dilakukan pemilahan yang dimulai dari sumber sampah dan disiapkan fasilitas oleh pemerintah berupa tempat sampah yang berbeda jenis dan masih adanya pegawai maupun petugas kebersihan yang belum berjalan sesuai tugas dan fungsinya sehingga yang terjadi masih banyaknya sampah yang tidak terurus di beberapa titik yang telah dijadikan sebagai sasaran kebijakan.

Pendapat De Goumay dalam (Harun, 2019) salah seorang perintis studi birokrasi pada tahun 1764 di Perancis menemukan sebuah penyakit pemerintahan yang disebut "Buruemania", untuk menyebutkan bentuk pemerintahan yang banyak di keluhkan dimana para pejabat juru tulis, sekertaris, para inspektur dan manajer diangkat bukan mengutamakan kepentingan umum. Akan tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi, dan atau golongan. Sejak itu istilah birokrasi mulai diperkenalkan, dalam perbendaharaan bahasa pada abad ke 18 sudah mulai istilah "bureau" yang diserap dari konsep Yunani tentang pemerintahan yang diartikan: meja tulis, tempat para pekerja bekerja, dan ditambahkan arti aturan. Albrow (1989:3) dalam (Silalahi, 2012), menjelaskan istilah ini kemudian mengalami transliterasi sebagai mana istilah *democracy*, sehingga menjadi "bureaucracy".

kata ini dengan cepat di terima dalam politik intemasional, dan menjadi Bureucratie (Prancis) Bureukratie (Jerman), Burocrazia (Italia), dan Bureucracy (Inggris). Kata ini dalam kamus mengartikan sebagai kekuasaan pejabat dalam pemerintahan.

Secara umum, Patologi birokrasi adalah penyakit dalam birokrasi Negara yang muncul akibat perilaku para birokrat dan kondisi yang membuka kesempatan untuk itu, baik yang menyangkut politis, ekonomis, sosial kultural dan teknologikal. (Irawan, 2013), misalnya, mengakui adanya *patologi birokrasi*. Hal itu dicirikan oleh kecenderungan patologi karena persepsi, perilaku dan gaya manajerial, masalah pengetahuan dan ketrampilan, tindakan melanggar hukum, keperilakuan, dan adanya situasi internal.

Gejala patologi dalam birokrasi, menurut Sondang P. Siagian (1994:35-145) dala (Raga et al, 2020), bersumber pada limamasalah pokok yaitu:a) Persepsi gaya manajerial para pejabat di lingkungan birokrasi; b) Rendahnya pengetahuan dan keterampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional; c) Tindakan pejabat yang melanggar norma-norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d) Manifestasi dalam perilaku birokrat yang bersifat disfungsional atau negatif; e) Akibat situasi intemal dalamberbagai instansi dalamlingkunganpemerintahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan hal ini dikarenakan Kaupaten Sinjai merupakan area fokus penelitian dan merupakan daerah yang memiliki kebijakan tentang pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif deskriptif yaitumendeskripsikan atau memberikan gambaran dan analisis mengenai patologi birokrasi pengelolaan sampah di kabupaten sinjai. Data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi. Dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari kata-kata dan

tindakan, sumber tertulis, data statistik, dan bahan hukum.

Data diperoleh dari informan yang terlibat dalam pengelolaan sampah dikabupaten sinjai yaitu melibatkan pihak pemerintah daerah dalam hal ini kepala dinaslingkungan hidup dan kehutanan kabupaten sinjai, dan tiga kecamatan yaitu kecamatan Sinjai Utara, Sinjai Selatan dan Sinjai Borong serta masyarakat kabupaten sinjai. Teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dan pemanfaatan dokumen tertulis.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan data yang diperoleh serta hasil penelitian. Tahapan analisis data antara lain; reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Patologi Birokrasi Yang Berupa *Disfunctions Of Bureaucracy* (Gejala Penyimpangan Birokrasi) Yakni Berkaitan Dengan Struktur

Dalam penanganan kebersihan pemerintah telah melakukan pembentukan satuan tugas yang dalam hal ini tertuang pada keputusan bupati nomor 136 tahun 2020 dan menetapkan camat sebagai bagian dari tim yang dipercayakan sebagai satgas kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dan tindaklanjut camat kepada kelurahan untuk membentuk satgas dilingkup masing-masing kelurahan. Setiap unsur pemerintah dalam penangan kebersihan tentunya memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam menanganinya begitupun dengan pemerintah kecamatan yang memiliki peran untuk mengkoordinasikan sampai kelevel terbawah dan sudah tentu pula itu menjadi keharusan bagi setiap level pemerintahan disetiap kecamatan karena telah menjadi ketentuan didalam peraturan daerah nomor 10 tahun 2017.

Berkaitan dengan gejala penyimpangan birokrasi (Rontos et al., 2019) yakni berkaitan dengan struktur yaitu tidak adanya kejelasan secara jelas yaitu dalam bentuk penugasan secara adminstrasi dari tiga kecamatan dan tidak adanya ketetapan program yang jelas yang berkaitan dengan kebersihan baik yang

berupa jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Bentuk Patologi *Disfunctions Of Bureaucracy* (Gejala Penyimpangan Birokrasi) Yakni Berkaitan Dengan Aturan

Penanganan kebersihan khususnya pengelolaan sampah sesuai kebijakan yang telah dirumuskan pada tahun 2017 yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 telah diatur oleh pemerintah bahwa dalam hal penanganan kebersihan sudah diatur secara jelas mengenai partisipasi semua pihak sekaitan dengan penanganan kebersihan termasuk sarana dan prasarana yang menjadi penunjang utama maksimalnya penanganan tentang kebersihan itu sendiri.

Sarana dan Prasarana memang merupakan penunjang utama dalam pelayanan kebersihan khususnya persoalan pengangkutan apalagi dalam peraturan daerah tersebut telah ditetapkan dengan jelas terkait jadwal pengangkutan sampah (Karim, 2019), sehingga ketika kendaraan atau sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan sampah otomatis akan mempengaruhi kebijakan yang telah ditetapkan.

Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling rendah (5) jenis sampah yang terdiri atas: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, b. sampah yang mudah terurai, c. sampah yang dapat digunakan kembali, d. sampah yang dapat didaur ulang dan sampah lainnya.

Kebijakan peraturan daerah pasal 18 ayat 1 yang telah ditetapkan bahwa jenis sarana pengangkutan sampah meliputi yaitu gerobak sampah, motor sampah, truk sampah dan sejenisnya. Dan selanjutnya di ayat 2 dinyatakan bahwa sarana pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sesuai standar sebagai berikut: a. menggunakan bak dengan penutup dan b. tinggi bak maksimum 1,6 meter.

Masih banyaknya aturan yang belum bisa diimplementasikan sebagaimana mestinya termasuk dalam hal ini fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang telah dijelaskan dalam peraturan daerah sesuai yang tertera pada peraturan daerah ayat 1 pasal 18

termasuk dalam hal ini jenis dan pembeda tempat sampah sesuai jenisnya serta kenyamana warga ketika pengangkutan dilaksanakan yakni mobil truk yang mengangkut harus tertutup untuk menghindari terjadinya indikasi yang mengganggu kesehatan dan sudah memang sepatutnya dijelaskan dalam kebijakan peraturan daerah pasal 18 ayat 2.

Bentuk Patologi Birokrasi *Disfunctions Of Bureaucracy* (Gejala Penyimpangan Birokrasi) Yakni Berkaitan Dengan Prosedur Atau Berkaitan Dengan Karakteristik Birokrasi Atau Birokrasi Secara Kelembagaan Yang Jelek

Sejatinya pemerintah yang telah diberikan tugas dalam hal penanganan kebersihan semestinya ada program dan sosialisasi rutin yang harus dilakukan sehingga penanganan kebersihan dapat dimanajemen dengan baik sehingga kesadaran masyarakat akan kebersihan bisa tumbuh bukan malah sebaliknya, karena tentu persepsi negative masyarakat yang akan muncul dari masyarakat atas ketidak konsitenan pemerintah akan kesadaran kebersihan.

Perlu adanya pengawasan yang ketat bagi pihak pemerintah terhadap regilasi yang telah ditetapkan berpu reklame yang jelas dipasang dibeberapa sisi jalan khususnya yang ada diwilayah perkotaan, karena dengan masih adanya sampah yang berserakan menandakan belum adanya sanksi yang diberikan oleh pihak pemerintah kepada kelompok ataupun instansi atau perseorangan yang membuang sampah bukan pada tempatnya.

Karakteristik birokrasi atau birokrasi secara kelembagaan yang jelek sangat dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang maksimal (Mustanir et al, 2019) sehingga program yang terlaksana memang betul-betul sesuai dengan target yang idealnya khususnya seluruh stack holder yang ada bukan hanya sekedar menuntaskan program tanpa memperhatikan dampak buruk yang akan terjadi seperti misalnya sudah ditetapkannya aturan dibeberapa tahun namun masalah yang berkaitan dengan kebersihan masih menjadi beban khususnya bagi pemerintah itu sendiri yang seharusnya itu sudah banyak pelajaran dari tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perbaikan khususnya pembinaan

yang berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi kepada semua elemen masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Bentuk Patologi Birokrasi Mal-administration

Mal-administrasi yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok (Ishaka, 2019), adanya aturan berupa sanksi dari kebersihan sebagai konsekuensi terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berpotensi menimbulkan perilaku ini dapat disogok termasuk dalam hal ini apakah adanya factor kedekatan ataupun factor lain dan hal itu dapat dilihat dari masih adanya sampah yang berceceran pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai larangan misalnya selokan dan termasuk di beberapa sisi jalan.

Kelancaran proses pelayanan sangatlah berpengaruh dengan persoalan-persoalan teknis dan tidaklah dapat berjalan dengan maksimal suatu kegiatan apabila tidak saling bersinergi antara pihak yang satu dengan yang lainnya termasuk dalam hal ini kendaraan yang macet.

Salah satu bagian dari patologi birokrasi yaitu dikarenakan tidak sensitifnya pemerintah terhadap masyarakat akan kesadaran terhadap kebersihan itu sendiri (Hamirul, 2020), di beberapa wilayah memang memerlukan pembinaan yang cukup untuk menstabilkan pola pikir masyarakat khususnya terkait tentang kebersihan program sosialisasi yang selama ini yang dilakukan tentunya sudah menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah akan kelemahan dan kekurangannya sehingga sebagai bahan pelajaran untuk melakukan perubahan strategi untuk perbaikan dan kesempurnaan kedepannya.

Dalam penanganan sampah ini pemerintah perlu melakukan koordinasi, komunikasi dan edukasi yang rutin kepada masyarakat dikarenakan sumber timbulah sampah itu didasari dari masyarakat dan membangun kesadaran akan kebersihan merupakan proses yang tidaklah mudah dan cepat memerlukan waktu yang panjang dan mesti memaksimalkan edukasi secara rutin dari pemerintah kepada masyarakat.

Kualitas sumber daya manusia atau birokrat yang ada didalam birokrasi dapat dikatakan bermasalah apabila tidak mampu melakukan perbaikan setelah melihat kekurangan dan kelemahan atas implementasi

kebijakan yang dijalankan (Hardiyansyah, 2019), merubah polapikir masyarakat akan kesadaran tentang kebersihan tidak cukup dalam jangka waktu yang singkat, namun sebagai tugas dari pemerintah empat tahun bahkan merupakan waktu yang sudah bisa untuk melakukan pembenahan atas kekurangan dan kelemahan yang telah didapatkan termasuk dalam hal ini yang berkaitan dengan peran aktif setiap birokrat dimasing-masing posisinya.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Sinjai Dalam Mengatasi Bentuk Patologi Birokrasi Pengelolaan Sampah.

Upaya yang dilakukan pemerintah kabupaten Sinjai dalam mengatasi bentuk patologi birokrasi yaitu dengan melakukan Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah berupa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dimasing-masing level untuk memberikan kesadaran yang sifatnya mampu menjadikan budaya bagi setiap masyarakat maupun seluruh komponen masyarakat atau setiap lembaga agar mampu sadar akan pentingnya yang namanya kebersihan sehingga hal itu mampu menjadikan karakter akan kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Kabupaten Sinjai merupakan salah satu daerah yang masih sangat membutuhkan pembinaan dalam hal membudayakan masyarakat akan kesadaran kebersihan masih sangat dibutuhkan kerja keras dan kerjasama dari berbagai elemen khususnya dari pihak pemerintah.

Telah diketahui secara bersama bahwa salah satu yang masih menjadi problem secara struktur yaitu pemerintah belum mampu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan kebersihan dalam hal ini dalam regulasi pemerintah telah menargetkan untuk dilakukan pemilahan sampah dari rumah tangga akan tetapi belum ada sarana tempat sampah berbeda jenis yang disiapkan, ketentuan pada regulasi bahwa truk pengangkut sampah seharusnya tertutup, akan tetapi kenyataannya masih terbuka, beberapa sisi jalan terpampan jelas reklame aturan kebersihan akan tetapi sampah masih berserakan di beberapa disisi jalan.

Aturan telah menetapkan bahwa seluruh elemen pemerintah khususnya bertanggungjawab dalam penanganan kebersihan termasuk dalam hal ini tingkat kecamatan dan kelurahan, namun dari hasil pernyataan beberapa pihak masih belum menetapkan misalnya satgas dimasing-masing kecamatan sebagai petugas yang focus menangani kebersihan pada maing-masing wilayah kecamatan sampai tingkat kelurahan. Melalui dari problem yang ada tersebut maka salah satu jalan yang mesti dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan malukukan evaluasi regulasi serta evaluasi kinerja dari masing-masing pihak pemerintah sehingga kekurangan dan kelemahan yang didapatkan kedepannya bisa dilakukan pembenahan yang bersifat membina sehingga manajemen pengelolaan kebersihan bisa lebih maksimal.

Khususnya sampah rumah tangga bisa dikelola oleh masing-masing Bank Sampah yang ada di Kabupaten Sinjai dan dalam hal ini meskipun Bank Sampah merupakan inisiasi dari lembaga swadaya masyarakat penting bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan lebih maksimal dan pembinaan selanjutnya yaitu sosialisasi serta edukasi yang kepada masyarakat yang mesti dirutinkan kalau perlu media yang ada di kabupaen Sinjai khususnya harus mengambil peran untuk mensosialisasikan di media terkait dengan kebersihan itu sendiri.

Pembinaan merupakan salah satu aspek utama untuk menanamkan budaya kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan itu semestinya digalakkan oleh seluruh komonen pemerintah dari tingkat bupati sampai di keurahan/desa dan selain itu selanjutnya yang mseti dilakukan adalah ketegasan dalam bentuk pengawasan dari pemerintah agar masyarakat betul-betul bisa menjadi garda terdepan dalam memelihara kebersihan lingkungan.

Pengawasan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai No. 10 Tahun 2017 BAB XI tentang Pembinaan Pengawasan dalam hal ini bahwa Bupati melakukan pengawasan atas pengelolaan sampah. Peranpetugas kebersihan diberbagai wilayah tentunya selain bertugas dalam hal penanganan sampah juga tentunya bertugas untuk mengatur dan melakukan pengawasan pada titik-titik yang telah diberikan tanggungjawab bagi masing-

masing petugas sehingga masyarakat mampu mengatur jadwal pembuangan sampah.

Dalam menjalankan suatu kebijakan tentunya yang menjadi konsekuensi utama yaitu anggaran dikarenakan anggaran merupakan penunjang utama dalam menggerakkan suatu kebijakan

Pengawasan merupakan tugas dari seluruh elemen khususnya pemerintah yang memiliki posisi startegis dimata masyarakat sehingga peran pemerintah sangatlah diperlukan pengawasan yang dilakukan tentunya bukanlah semata langsung dilakukan secara langsung melainkan sebelumnya telah ditetapkan regulasi dan tentunya edukasi regulasi yang telah diterapkan sebelumnya. Pengawasan dilakukan dari pihak pemerintha Bupati mengawasi kecamatan, kecamatan mengawasi kelurahan, kelurahan mengawasi masyarakat.

SIMPULAN

Disfunctions of bureaucracys salah satu yang masih menjadi problem secara struktur yaitu pemerintah belum mampu memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana serta pelayanan yang baik bagi masyarakat dalam penanganan kebesihan dalam hal ini dalam regulasi pemerintah telah menargetkan untuk dilakukan pemilahan sampah dari rumah tangga akan tetapi belum ada sarana tempat sampah berbeda jenis yang disiapkan, ketentuan pada regulasi bahwa truk pengangkut sampah seharusnya tertutup, akan tetapi kenyataannya masih terbuka, beberapa sisi jalan terpampan jelas reklame aturan kebersihan akan tetapi sampah masih berserakan dibeberapa disisi jalan.

Mal-Administrasi yaitu aturan telah menetapkan bahwa seluruh elemen pemerintah khususnya bertanggungjawab dalam penanganan kebersihan termasuk dalam hal ini tingkat kecamatan dan kelurahan, namun dari hasil analisis menunjukkan masih terbatasnya akses pelayanan yang berupa pengangkutan sampah disebabkan dalam hal pegangkutan sampah mesti ada koordinasi secara administrasi dari kelurahan kepada dinas terkait untuk melakukan penanganan yang seharusnya sudah harus ada jadwal dan petugas yang jelas dalam penanganan tersebut.

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sinjai dalam mengatasi bentuk patologi birokrasi yang dihadapi dalam

implementasi kebijakan kebersihan yaitu tidak maksimalnya pembinaan seperti misalnya edukasi kesadaran kebersihan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap masyarakat yang masih membuang sampah disembarang tempat yang dilakukan disetiap level pemerintahan mulai dari tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan sampai pada tingkat kelurahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardilah, T. (2014). Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Di Desa Bareng Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 71-77.
- Hamirul, H. (2020). *Metode Penelitian Dalam Kerangka Patologi Birokrasi*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio (STIA) Muara Bungo.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Gava Media.
- Harun, N. I. (2019). Rekrutmen Elit Birokrasi. Desentralisasi Salah Kaprah? Sebuah Studi Terhadap Penataan Jabatan Struktural di Kabupaten Gorontalo Utara. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 042-049.
- Irawan, R. (2013). Urgensi Manajemen Birokrasi Profesional Untuk Mengatasi Kemunduran Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 46-59.
- Ishaka, M. (2019). Strategi Kebudayaan Dalam Pemberantasan Korupsi Pada Birokrasi Pemerintahan Kota Bima. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 1-19
- Karim, R. (2019). *Penerapan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah di Wilayah Pesisir Kabupaten Sinjai* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).
- Ma'ruf, M. M. (2010). Patologi Birokrasi. *Jurnal Visioner*, 4(3), 1-18
- Mustanir, A., Uceng, A., Kasau, M. N. R., & Andriani, D. (2019). Karakteristik Kepemimpinan Lurah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. *JCG: Jurnal Clean Government*, 2(2), 145-172.
- Raga, Y. W. I. Y., Wadu, J. J., & Ratoebandjoe, P. (2020). Identifikasi Patologi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Pertanahan Kabupaten Belu. *Jurnal Administrasi Publik*, 16(1), 15-31.
- Rizal, R. (2017). Fungsi Pengawasan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Limbah Medis Balai Kesehatan/poliklinik di Kecamatan Tampan. *Jurnal Renaissance*, 2(02), 270-277.
- Rontos, I. C., Sambiran, S., & Mantiri, M. (2019). Perilaku Birokrasi Dalam Pelayanan Publik (Studi di Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan). *JURNAL EKSEKUTIF*, 3(3), 1-12
- Silalahi, U. (2012). Birokrasi tradisional dari satu kerajaan di Sumatra: Harajaon Batak Toba.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Yunas, N. S. (2016). Kepemimpinan Dan Masa Depan Reformasi Birokrasi Di Indonesia. *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(2), 103-114.